ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016-2017

Syamsidar¹, Emmi Suryani Nasution², Herayani³

^{1,2)} Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, syamsidarse@gmail.com, emmi.march@yahoo.com

³⁾ Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

Abstract: *The aim of this study is to know the Zakat management, at Bait Al- Mal of Great Aceh District related to the zakat mal management system which is set in the law number 23 of 2011. There are 5 systems for Zakat management, they are: planning, coordinating, implementing, collecting and distributing. And whether it complies with the law and Islamic economics. This study uses a qualitative method with data collection techniques are observation, interviews, and documentation. With the flow model analysis techniques they are data collection, reduction, presentation, and conclusion. Based on the results of research conducted by researchers through qualitative method with flow model data analysis techniques of data collection, reduction, presentation, and conclusion, then the results obtained that the planning, coordinating, implementing, collecting and distributing has been done by the Bait Al- Mal of Great Aceh District, overall compliance with the rule of law number 23 of 2011..*

Keywords : *the Zakat Management of Bait Al-Mal of Great Aceh District*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terkait sistem pengelolaan zakat Baitul Mal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat 5 sistem/prosedur pengelolaan zakat yaitu: perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dalam pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan. Dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data model alir yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode kualitatif dengan teknik analisis data model alir yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dalam pengumpulan dan pendistribusian/pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Kata kunci : **Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.**

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai (Budi, 2008:16).

Dalam pasal 15 UU No 23 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait dengan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan, Di Provinsi Aceh, penyebutan BASNAS provinsi atau BASNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal.

Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh ialah Unadang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di samping itu, Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Aceh (termasuk Baitul Mal) menetapkan sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan struktural. Pada tingkat Kabupaten/kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menetapkan Sekretariat Baitul Mal/Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten/Kota dalam Jabatan Struktural.

Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat Digunakan Untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh khususnya di daerah Kabupaten/Kota terdapat 23 (dua puluh tiga) Baitul Mal yang sukses dalam pengelolaan zakat sampai saat ini. Jika dibandingkan diantara Baitul Mal Kabupaten, terdapat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang paling sukses dalam hal pengelolaan dan pelaksanaannya di saat ini.

Namun, jika dilihat beberapa tahun yang lalu Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar juga pernah ditimpa persoalan dalam hal pengelolaan zakat yang disebabkan oleh badan pelaksana atau mekanisme dalam menjalankan sistem pengelolaan zakat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Mengenai penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang beberapa tahun lalu pernah ditimpa permasalahan dalam pengelolaan zakat, kemudian bisa sukses dalam pengelolaan zakat. Dan peneliti juga tertarik karena lokasi atau letak Baitul Mal Aceh Besar yang tidak terlalu jauh dari kota yang ditempati peneliti, sehingga peneliti mudah dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengelolaan zakat dengan judul: **Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017.**

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 disahkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemututusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana, oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus diperhatikan, di antaranya: hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan (Hafidhudin, Didin dan Hendri, 2009:78). Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan dan perkiraan hari, dan rangkaian aktifitas yang berhubungan dengan tujuan pencapaian tujuannya.

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 2 pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pada BAZNAS Propinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan

perwakilan republik Indonesia di luar negeri serta dapat membantu UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pengkoordinasian Pengelolaan Zakat

Pengkoordinasian/pengawasan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Dalam Islam, pengawasan terbagi dua, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, kedua, kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri (Fakhrudin, 2008: 321).

Dengan diterapkan akuntansi yang baik maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik, karena dengan akuntansi dapat mengetahui kinerja keuangan, terlebih lagi jika keuangan yang telah dibuat dipublikasikan secara umum.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk (Fakhrudin, 2008: 316):

1. Menyajikan informasi apakah organisasi dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Untuk menilai manajemen organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab.
3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan organisasi dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan atau program tersebut.

Pengumpulan Zakat

Pada pasal 21, 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 25, 26 dan 27 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Akuntansi Zakat

IAI (2012:3-7), Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun *Exposure Draft* (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua Lembaga Keuangan Syariah baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat.

Pada Rancangan ED PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang Zakat dan Infak/Sedekah adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat. Dalam terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakikatnya perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI. Akhirnya ED PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah.

Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Ummu (2011) tentang model pengelolaan zakat. Dari ini mengkaji tentang potensi pengembangan dan beberapa contoh model pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh pemimpin islam terdahulu. Dan hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwasanya dahulu pada masa berjayanya pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti yang dikelola Umar bin Abdul Aziz zakat ditarik secara paksa dari muslim yang mampu dan dana zakat tersebut dimanfaatkan dan disalurkan disalurkan untuk kepentingan umat.

Suharno (2010) tentang pengelolaan zakat infak dan shadaqah pada Rumah Zakat Indonesia. Menunjukkan bahwa dalam penelitiannya mekanisme yang dilakukan pada Rumah Zakat Indonesia adalah menghimpun dana dari sumber-sumber dana yang berasal dari pihak satu (muzakki). Setelah donasi tersebut terkumpul maka pengelola atau pihak kedua dalam hal ini adalah rumah zakat Indonesia harus mengeluarkan dana pengelolaan. Setelah dana pengelolaan dikeluarkan maka rumah zakat Indonesia bisa menyalurkannya pada pihak ke 3 (mustahik).

Ancas (2006) tentang Pelaksanaan pengelolaan zakat Menurut Undang-Undang 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang, dan hasil dari penelitian tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat datasi oleh Badan Amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat setiap masjid setiap ada pengajian maupun pada hari jum'at secara rutin.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Mal Aceh Besar. Baitul Mal Kabupaten Aceh

Besar ini terletak di kantor Bupati Aceh Besar, Jalan T. Bachtiar Panglima Polem No.1 Kota Jantho. Objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan beberapa cara serta teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Menurut Nazir (2014:211), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan, metode khusus.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model alir. Langkah-langkah analisis data model alir menurut Miles dan Huberman (2012:15-19), adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah peneliti.

Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Zakat Di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan zakat dan kondisi atau proses pengelolaan Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh besear.

Sistem pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, pengurus zakat selain memiliki *skill* yang bagus dalam mengelola, pengurus juga harus mempunyai target dan rencana yang disusun secara sistematis bertujuan untuk memajukan Baitul Mal Aceh Besar ini dalam mencapai tujuan dari Baitul Mal Aceh Besar pada khususnya.

Dalam pengelolaan zakat yang baik maka sangat dibutuhkan langkah-langkah sebagai landasan agar tercapainya tujuan sebuah manajemen. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar juga telah menerapkan fungsi pengelolaan sebagai langkah-langkah tersebut, diantaranya:

Perencanaan Zakat

Perencanaan merupakan suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat ini berguna untuk menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan dan cara untuk mencapainya. Maka dari itu langkah yang diambil Baitul Mal dalam perencanaan awal adalah merumuskan keadaan atau kondisi zakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Perencanaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh staf dan skretariat Baitul Mal. Perencanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal dilakukan dengan membuat Naskah Perjanjian Hiba (NPH), naskah ini dibuat oleh staf Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, dan kemudian dimusyawarahkan bersama pengurus Baitul Mal, untuk memperoleh hasil yang sesuai, untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya perumusan untuk para mustahiq, sebelum pendistribusian zakat

dibagikan kepada 8 asnaf maka petugas zakat perlu memilih para calon mustahiq yang benar-benar berhak menerima harta zakat dengan sangat selektif agar pendistribuan zakat tepat pada sasaran.

Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Langkah ini diambil dalam rangka untuk langkah persiapan jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan, sehingga sudah ada strategi lain dipersiapkan sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan hal buruk yang terjadi.

Selanjutnya adalah pengembangan serangkaian kegiatan dan alternatif. Alternatif kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga dari alternatif kegiatan ini maka akan menjadi program kerja bagi petugas zakat. Pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari perencanaan berbentuk program kerja yang dirumuskan untuk mempermudah bagi petugas dalam menjalankan kerja mereka. Program kerja ini biasa bergerak dalam proses pengumpulan, pendayagunaan/pendistribusian.

Setelah naskah selesai, selanjutnya pihak Baitul Mal Naskah Perjanjian Hiba (NPH) tersebut kepada Bupati untuk dipertimbangkan dan disahkan.

Pelaksanaan Zakat

Dalam proses pelaksanaan peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong petugas zakat agar mereka lebih semangat dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Seorang pemimpin juga selalu mendapat masukan-masukan yang sangat bagus, sehingga hal itu digunakan untuk menjalankan kegiatan dalam pengelolaan zakat ini. Sehingga secara bersamaan hal ini menimbulkan efek yang luar biasa bagi para petugas zakat itu sendiri, yakni mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas zakat. Dan dalam hal ini sebagai pimpinan juga bukan hanya tinggal diam namun ikut berpartisipasi dalam menjalankan setiap ide dengan cara terus memantau dan mengarahkan kinerja mereka.

Pimpinan Baitul Mal Aceh Besar sangat tegas dalam segala tindakannya, sehingga petugas sangat hati-hati dalam setiap pekerjaannya. Karena apabila terjadi kesalahan maka itu akan langsung mendapatkan teguran dari pimpinan langsung. Sehingga tidak ada beban yang cukup berat yang harus petugas pikul mengingat bahwa mereka selalu

melaksanakan pekerjaannya berdasarkan jiwa tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, maka harus dilaksanakan.

Pengoordinasian Zakat

Dalam mengoordinasi kinerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar langsung diawasi oleh Tim Pembina Kepemerintahan Aceh Besar yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Pasal 2 dan 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Bahwa tim pembina di usulkan oleh Baitul Mal untuk membina dan mengawasi Baitul Mal, dan tim pembina juga bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan di dalam Baitul Mal sendiri langsung diawasi oleh pemimpin Baitul Mal sendiri. Namun, dalam mengoordinasi para petugas zakat bukan hanya pemimpin yang berperan, melainkan orang-orang yang terdapat pada bidang pelaksana tersebut. Diantaranya, anggota bidang pengumpulan diawasi atau dikoordinasi oleh kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengelolaan, dan juga bidang pengembangan.

Pengumpulan Zakat

Cara pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar ada 3(tiga) macam yaitu:

1. Penyetoran langsung

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar membentuk atau membuka nomor rekening zakat, agar muzakki dapat langsung mengirim zakatnya melalui rekening yang telah disediakan oleh Baitul Mal.

2. Penjemputan langsung

Adanya muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka membutuhkan orang lain. Dengan adanya penjemputan langsung yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, maka muzakki dapat menghubungi pihak Baitul Mal, untuk menjemput zakatnya masing-masing.

3. Potongan langsung (gaji pegawai) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Pemotongan langsung tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Aceh Besar dengan kriteria sebagai berikut :

1. Guru/pengawas sertifikat tanpa memperincikan jumlah gaji dipungut 2,5%
2. Guru/pengawas non sertifikat dibawah dinas pendidikan dan kementerian agama dipungut 2,5%, bagi yang bergaji diatas Rp 2.950.000
3. PNS dibawah jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan lembaga vertikal lainnya dipungut 2,5% bagi yang bergaji diatas Rp 3.275.000
4. Bagi pegawai yang tidak tetap jika penghasilan mencapai nisab Rp 3.800.000 maka dikenakan zakat 2,5%, bagi pegawai yang bergaji di bawah ketentuan pada point a, b, c dan d maka dikenakan infaq 1%

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Permohonan bantuan

Cara pendayagunaan ini dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, untuk memudahkan masyarakat dalam menerima bantuan yaitu dengan cara mustahiq mengajukan proposal ke Baitul Mal.

2. Pemberitahuan dari masyarakat

Hal ini dilakukan agar memudahkan pihak Baitul Mal, dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

3. Survei lapangan

Selain dua strategi di atas, pihak Baitul Mal juga mensurvei langsung ke lokasi masyarakat yang kurang mampu, dengan menjumpai kepala Gampong terlebih dahulu. Kemudian Baitul Mal akan didampingi oleh kepala Gampong saat proses mensurvei.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Sistem pengendalian internal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pengendalian pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menjadi tugas dari badan pengawas. Berdasarkan keputusan Menteri Nomor 581 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan, seluruhnya harus diketahui oleh Badan Pengawas.

Dalam setiap proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan, peran dari Badan Pengawas sudah ada.

Sehingga bisa dikatakan pengendalian yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tidak hanya melihat laporan tertulis dari setiap bidang, tetapi juga dilakukan dalam setiap proses pengelolaan zakat.

Pemerintah daerah dan DPRD Aceh Besar melakukan pengawasan dari laporan tertulis pelaksanaan pengelolaan zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk pelaporan kepada masyarakat dan muzakki, munfiq, mushaddiq melalui bulletin yang setiap 3 bulan sekali diterbitkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. (Wawancara langsung dengan Kepala Baitul Mal Aceh Besar H.Drh. Daniwaldi pada Tanggal 10 Mei 2017, 11:06 WIB).

ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis Sistem Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Besar dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lain yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Yakni dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Perencanaan Zakat

Perencanaan kegiatan maupun program kerja pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilakukan sesuai aturan yang berlaku pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan setiap perencanaan.

Pelaksanaan Zakat

Pelaksanaan tugas di Baitul Mal kabupaten Aceh Besar dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal, pelaksanaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Amil Baitul Mal Aceh Besar dengan cara

bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu.

Pengoordinasian Zakat

Pengoordinasian pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar selain peran penting pimpinan/kepala Baitul Mal Aceh Besar dalam mengkoordinasikan petugas zakat dalam menjalankan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintahan Aceh Besar. Badan Pengawas dari pemerintahan juga ikut melakukan pengoordinasian terhadap petugas Baitul Mal dan mengawasi langsung Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Pengumpulan Zakat

Kegiatan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh bagian pengumpulan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pembayaran zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar juga cukup dimudahkan dengan adanya 3 cara pembayaran, yakni dengan datang langsung ke kantor Baitul Mal Aceh Besar, penjemputan zakat oleh petugas, melalui UPZ dan via mentrasfer.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat petugas Baitul Mal setiap tahunnya selalu melakukan validasi pada mustahiq dengan bekerjasama dengan aparat kelurahan dan masyarakat setempat. Dengan demikian pendistribusian zakat bisa tepat sasaran.

Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Penerapan sistem pengendalian intern di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan zakat di pengurusan tahun 2016-2017 sudah sepenuhnya dilakukan oleh badan pengawas yang bertugas dalam melaksanakan pengendalian internal. Sejauh ini jika dilihat dengan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal yakni badan pengawas pada kepengurusan yang lalu sudah dilaksanakan dengan benar.

Baitul Mal Aceh Besar sudah menggunakan teknis atau SOP untuk pengendalian internal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan dan penyaluran yang dilakukan

Baitul Mal, dan laporan pelaksanaan oleh badan pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, sistem pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sudah sangat efektif dalam menjalankan :

1. Perencanaan pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Baitul Mal sesuai bidang masing-masing dan sesuai tanggung jawab yang dibebankan/diberikan oleh Baitul Mal sendiri.
3. Pengoordinasian pengelolaan zakat yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah dilakukan sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Saran

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar harus lebih teliti dalam mendata penerima zakat. Untuk menghindari perselisihan/kesalahpahaman dari penerima zakat, sebaiknya Baitul Mal kabupaten Aceh Besar memberikan penjelasan tentang peraturan yang berlaku dalam pengelolaan zakat tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Baznas, (2011). *Baznas Audit 2011*. [http://www. Pusat.baznas.go.id/](http://www.Pusat.baznas.go.id/). diakses pada tanggal 24-03-2014 pukul 07:47
- B. Mathew, Miles, dan Michael Huberman. (2012). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Departemen Agama RI. (2005). *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*. Jakarta: Depag RI,.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhudin, D. dan Hendri Tanjung. (2009). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kartika Sari, Elsi. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- Lexy J, Moleong. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26.
- Musa, Armiadi. (2016). *Baitul Mal Directory*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (Lazis) Sulawesi Tenggara*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Purwakananta, M. Adan Aflah, N. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: Forum Zakat (FOZ).
- Rafi, M. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sulchantifa, A. (2006). *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sukarna, (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. tentang Pengelolaan Zakat.